

**URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI
INDONESIA**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Disusun Oleh :

MIRA DIVA PRASYANTI

21071010150

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) SEBAGAI UPAYA**

**PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI
INDONESIA**

Skrripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada tanggal, 23 Mei 2025

Penyusun,


MIRA DIVA PRASYANTI
21071010150

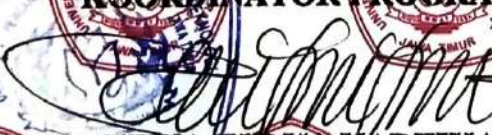
Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 1990011220 2012 2003

Mengetahui,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 1990011220 2012 2003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI
INDONESIA**

Penyusun,

Mira Diva Prasanti
21071010150

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

pada tanggal

PEMBIMBING

DEWAN PENGUJI

Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 1990011220 2012 2003

Dr. H. Sutrisno S.H., M.Hum.
NIP. 19601213 198603 4 001

2. **Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H.**
NIP. 19880322 201807 2 001

3. **Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.**
NIP. 1990011220 2012 2003

Mengetahui

Koordinator Program Studi

Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
NIP. 1990011220 2012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) SEBAGAI UPAYA**

**PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI
INDONESIA**

Penyusun,


Mira Diva Prasanti
21071010150

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal, 28 Mei 2025

PEMBIMBING


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 1990011220 2012 3003

DEWAN PENGUJI


Dr. H. Sutrisna, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

2. **Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H.**
NIP. 19880322 201807 2 001

3. **Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**
NIP. 1990011220 2012 3003

Mengetahui

Koordinator Program Studi


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 1990011220 2012 3003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

KATA PENGANTAR

Salam dan puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan proses penulisan Skripsi, yang berjudul “Urgensi Pembentukan Undang-undang Khusus Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai Upaya Pencegahan terhadap Praktik Pencemaran Lingkungan di Indonesia” ini dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Usulan Penelitian untuk Skripsi ini Penulis susun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1) berdasarkan kurikulum yang ada dan berlaku di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Usulan Penelitian untuk Skripsi ini dapat selesai dengan bantuan, dorongan, dan motivasi dari beberapa pihak, sehingga dalam kesempatan kali ini Penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, sekaligus pula Dosen Wali dan Dosen Pembimbing penulis dalam proses penyusunan Usulan Penelitian untuk Skripsi ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
8. Dila Safitri Kumalasari, Edghar Abdullah Albab, Fahriza Dhya Kusuma, Miskha Ainun Nisa, Nadia Faizah Putri Devina, Pramesti Putri Ridzky Hutami, Rehana Mardatila, Renny Ayu Puspitasari, selaku teman-teman yang telah memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa Usulan Penelitian untuk Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, maka penulis pun sangat terbuka dengan berbagai kritik dan saran yang membangun, agar nantinya karya ilmiah ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi penulis, serta dapat berguna baik bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya, Mei 2025

Hormat saya,

Mira Diva Prasyanti

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mira Diva Prasyanti
NPM : 21071010150
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemulan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juni 2025



Mira Diva Prasyanti
21071010150

INTISARI

Nama : Mira Diva Prasyanti
NPM : 21071010150
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 21 Januari 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (KBLBB) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PRAKTIK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

ABSTRAK :

Seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu perubahan iklim dan keberlanjutan, kendaraan listrik menjadi solusi alternatif yang menjanjikan. Namun, kurangnya regulasi yang jelas di Indonesia menghambat pengembangan industri ini. Melalui analisis peraturan yang ada di Jerman, yang telah berhasil mengintegrasikan teknologi kendaraan listrik dalam kebijakan transportasi, penelitian ini mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang perlu diadopsi untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung inovasi dan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang khusus sangat penting untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, meningkatkan infrastruktur pendukung, serta menjamin perlindungan lingkungan.

Kata kunci : KBLBB, Kendaraan Listrik, Baterai, Regulasi Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN REVISI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum	12
1.6.2 Pendekatan (Approach).....	13
1.6.3 Sumber dan Bahan Hukum	14
1.6.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	17

1.6.5 Metode Analisis Data.....	18
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	19
1.7 Tinjauan Pustaka	21
1.7.1 Tinjauan Umum Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	21
1.7.2 Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).....	23
1.7.3 Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Hukum	25
1.7.4 Tinjauan Umum Peraturan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Jerman.....	27
1.7.5 Tinjauan Umum Peraturan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia.....	28
BAB II URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS KBLBB DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP POTENSI PRAKTIK PENCEMARAN LINGKUNGAN DI INDONESIA	30
BAB III KONSTRUKSI PENGATURAN UNDANG-UNDANG KHUSUS KBLBB BERDASARKAN STUDI KOMPARASI DENGAN NEGARA PEMBANDING	46
3.1 Implementasi Aturan Hukum Terkait KBLBB di Jerman	46
3.2 Kerangka Pengaturan yang di Dalamnya Terdapat Hukum Terkait KBLBB oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan Studi Perbandingan dengan Jerman..	62
BAB IV PENUTUP	81
4.1 Kesimpulan	81

4.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	96

DAFTAR SINGKATAN

KBLBB	: Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	2
UU No.22/2009	: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2
GRK	: Gas Rumah Kaca	3
Perpres No. 55/2019	: Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>)	3
Menteri ESDM	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	4
Gaikindo	: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia	5
UU No. 32/2009	: Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	22
Permen LHK No.12/2021	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium	23
UU No.16/2016	: Undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang pengesahan <i>Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change</i>	26
UU No. 12/2011	: Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan	27

<i>Directive 2006/66/EC</i>	: <i>Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC</i>	30
Perpres No. 79/2023	: Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) untuk Transportasi Jalan	32
UU No. 3/2020	: Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	41
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun	47
Permen LHK No. 6/2021	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	47
SPKLU	: Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum	47
<i>BattG of 2009</i>	: <i>The Battery Act of German (Batteriegesetz – BattG) of 2009</i>	56

EmoG of 2015 : *The Electric Mobility Act (EmoG - 63
elektromobilitätsgesetz) of 2015*

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penjualan Wholesale KBLBB Periode Januari-Desember 2024	34
Tabel 2. Jumlah Produksi KBLBB di Indonesia	35
Tabel 3. Hasil Perbandingani Hukum dengan Negara Jerman dalam Rangka Pembuatan Undang-undang Khusus KBLBB di Indonesia	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alur Siklus Hidup Baterai.....	37
Gambar 2. Contoh Bentuk Baterai Milik Produsen Jerman (BYD).....	51
Gambar 3. Jumlah SPKLU di Jerman 2014-2024.....	56